

**ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH SEBAGAI PENILAIAN
KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN
ANGGARAN 2011-2015**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Tugas Dan Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:
ARIP EKO PRASTYO
B 200130406

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH SEBAGAI PENILAIAN
KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN
ANGGARAN 2011-2015**

PUBLIKASI ILMIAH

**Oleh:
ARIP EKO PRASTYO
B 200130406**

Telah diperiksa dan disetujui oleh:
Dosen Pembimbing



Dra. RINA TRISNAWATI, M.Si, Ph.D, Ak, CA.

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH SEBAGAI PENILAIAN
KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN
ANGGARAN 2011-2015**

Yang Ditulis Oleh:

ARIP EKO PRASTYO
B 200130406

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada Hari Sabtu, 13 Oktober 2018
Dan dinyatakan memenuhi syarat

Dewan Penguji :

1. Dra. Rina Trisnawati, M.Si, Ph.D, Ak, CA.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Drs. Suyatmin W.A., M.Si.
(Anggota Dewan Penguji 1)
3. Shinta P.S., SE, M.M.
(Anggota Dewan Penguji 2)

()



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta


(Dr. Syamsudin, M.M.)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 19 Oktober 2018

Penulis



ARIP EKO PRASTYO

B200130406

ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH SEBAGAI PENILAIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2011-2015

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo dengan menggunakan rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian, rasio pertumbuhan dan *debt service coverage ratio*. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian berbentuk deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2011-2015 yang diperoleh dengan menggunakan teknik dokumentasi. Metode analisis data menggunakan analisis rasio keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian masih sangat rendah dengan rerata 18,02% tetapi terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Rasio efektivitas cenderung efektif dengan rerata 116,04% sedangkan rasio efisiensi sudah efisien dengan rerata 95,30%. Pada rasio keserasian DPPKAD Kabupaten Sukoharjo masih diprioritaskan untuk belanja rutin (Operasi) 84,84% daripada untuk belanja pembangunan (Modal) 15,02%. Rasio pertumbuhan menunjukkan trend positif kecuali pada pos belanja modal ada yang negatif. *Debt service coverage ratio* sudah lebih dari standar kemampuan 2,5%. Dengan demikian, kinerja Pemerintah Kabupaten Sukoharjo berdasarkan analisis rasio keuangan daerah cukup baik.

Kata kunci: Pemerintah Daerah, Kinerja Keuangan, Rasio Keuangan.

Abstract

This study aims to analyze the performance of the local government of Sukoharjo Regency by using independence ratio, effectiveness ratio, efficiency ratio, harmony ratio, growth ratio and debt service coverage ratio. The type of research in this study is quantitative descriptive research. The data used in this study is secondary data in the form of Sukoharjo District Government Financial Statements 2011-2015 obtained by using documentation techniques. Data analysis method uses financial ratio analysis. The results showed that the independence ratio was still very low with an average of 18.02% but continued to increase every year. The effectiveness ratio tends to be effective with an average of 116.04% while the efficiency ratio has been efficient with an average of 95.30%. In the ratio of harmony of the DPPKAD of Sukoharjo Regency is still prioritized for routine expenditure (Operation) 84.84% than for development expenditure (Capital) 15.02%. The growth ratio shows positive trends except for capital expenditure items, there are negative ones. Debt service coverage ratio is more than 2.5% standard capability. Thus, the performance of the Sukoharjo District Government based on the analysis of regional financial ratios is quite good.

Keywords: Local Government, Financial Performance, Financial Ratios.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemberian hak otonomi daerah kepada pemerintah daerah sebagai pemegang kekuasaan yang diberikan kewenangan secara luas untuk menyelenggarakan semua urusan pemerintahan. Kewenangan tersebut mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan. Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Sebagai konsekuensi dari kewenangan otonomi secara luas, daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Pemerintah daerah sebagai pihak yang menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan terhadap masyarakat harus menyampaikan laporan keuangan daerahnya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerjanya. Dalam pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), mengungkapkan bahwa dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah harus menggunakan prinsip-prinsip akuntansi yang telah diterapkan. Peraturan tersebut merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Meningkatnya kinerja keuangan merupakan prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang akan dicapai sebagaimana diamatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2011-2015 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2013. Analisis terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo akan menghasilkan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan menilai apakah pemerintah daerah telah berhasil mengelola keuangannya dengan baik, serta memberikan dampak positif kesejahteraan masyarakat. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan daerah Kabupaten Sukoharjo

adalah melakukan analisis rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian, rasio pertumbuhan dan *debt service coverage ratio* (DSCR) (Rahmayati, 2016).

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tahun anggaran 2011-2015 dengan menggunakan rasio keuangan daerah.

1.2. Tinjauan Pustaka

1.2.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut pasal 1 UU No.32 tahun 2004 tentang otonomi daerah, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, didanai dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan semakin mandiri, mengurangi ketergantungan pemerintah pusat, baik dalam hal pembiayaan pembangunan maupun dalam pengelolaan keuangan daerah.

1.2.2. Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut (Sumenge, 2013). Usman (1998: 63) dalam Machmud, dkk. (2014), mengatakan salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata, kemampuan daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri adalah kemampuan *self supporting* dalam bidang keuangan.

1.2.3. Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja Keuangan Daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD. Salah satu alat ukur untuk menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah adalah

dengan menggunakan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan (Rondonuwu dkk. 2015).

1.2.4. Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa ataupun. Artinya bahwa setiap kegiatan organisasi merupakan suatu proses yang tercatat dalam misi dan sejalan dengan tujuan organisasi, dimana kegiatan tersebut dikatakan sukses apabila hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat luas. (Bastian, 2001: 121 dalam Pramono, 2014).

1.2.5. Analisis Rasio Keuangan

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim, 2007: 231, dalam Fathah, 2017). Beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja adalah sebagai berikut:

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Halim (2012) menyatakan bahwa kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lainnya misalnya bantuan pemerintah pusat (transfer pusat) maupun dari pinjaman.

Tabel 1.1 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0-25	<i>Instruktif</i>
Rendah	25-50	<i>Konsultatif</i>
Sedang	50-75	<i>Partisipatif</i>
Tinggi	75-100	<i>Delegatif</i>

Sumber: Halim (2007: 169)

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat dan Pinjaman}} \times 100\%$$

b. Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang

ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Pramono, 2014: 23, dalam Rahmayati, 2016).

Kriteria rasio efektivitas menurut Mahsun (2013: 187) dalam Hanik, (2014), yaitu:

- 1) Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100$) berarti tidak efektif.
- 2) Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100$) berarti efektivitas seimbang.
- 3) Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100$) berarti efektif.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target penerimaan PAD}} \times 100\% \text{ berdasar potensi riil daerah}$$

c. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima (Pramono, 2016).

Menurut Mahsun (2013: 187) dalam Hanik, (2014), kriteria efisiensi meliputi:

- 1) Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) berarti efisien.
- 2) Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$) berarti efisiensi berimbang.
- 3) Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$) berarti tidak efisien.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

d. Rasio Aktivitas/ Keserasian

Rasio aktivitas menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin (operasi) dan belanja pembangunan (modal) secara optimal. (Halim, 2014: 25, dalam Rahmayati, 2016).

$$\text{Rasio Belanja Rutin} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}}$$

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total APBD}}$$

e. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya (Pramono, 2014).

- 1) Persentase pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD)

$$\frac{\text{PAD Tahun } p - \text{PAD Tahun } p-1}{\text{PAD Tahun } p-1} \times 100\%$$

- 2) Persentase pertumbuhan pendapatan

$$\frac{\text{Pendapatan Tahun } p - \text{Pendapatan Tahun } p-1}{\text{Pendapatan Tahun } p-1} \times 100\%$$

- 3) Persentase pertumbuhan belanja operasi

$$\frac{\text{Pendapatan Tahun } p - \text{Pendapatan Tahun } p-1}{\text{Realisasi Belanja Operasi Tahun } p-1} \times 100\%$$

- 4) Persentase pertumbuhan belanja modal

$$\frac{\text{Belanja Tahun } p - \text{Belanja Tahun } p-1}{\text{Belanja Tahun } p-1} \times 100\%$$

Keterangan: p = tahun yang dihitung, p-1 = tahun sebelumnya

f. Debt service coverage ratio (DSCR)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah, DSCR merupakan perbandingan antara pendapatan asli daerah, bagian daerah dari pajak bumi dan bangunan, penerimaan sumber daya alam, dan bagian daerah lainnya serta dana alokasi umum setelah dikurangi belanja wajib, dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga dan biaya pinjaman lainnya yang jatuh tempo. Ukuran minimal DSCR adalah 2,5 (Pramono, 2014).

$$\text{DSCR} = \frac{(\text{PAD} + \text{BD} + \text{DAU}) - \text{BW}}{\text{Total (Pokok angsuran} + \text{Bunga} + \text{Biaya lainnya})}$$

2. METODE

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo. Sedangkan objek penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2011-2015 yang diperoleh dari Bidang Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban pada DPPKAD Kabupaten Sukoharjo.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun anggaran 2011-2015. Teknik Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode dokumentasi, yaitu pencarian data sekunder dengan mengumpulkan data dengan cara mempelajari catatan-

catatan dan dokumen-dokumen yang ada pada perusahaan atau instansi yang diteliti (Adhiantoko, 2013: 46, dalam Rahmayati, 2016).

Teknik analisis data menggunakan analisis rasio keuangan dengan cara menghitung, membandingkan, menganalisis dan menarik kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil perhitungan pada rasio kemandirian keuangan daerah bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tergolong rendah dengan pola hubungan instruktif di mana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah dan meskipun terjadi kenaikan dari tahun 2011 sampai tahun 2015 dengan rata-rata 18,02%. Pada tahun 2011 rasio kemandiriannya sebesar 11,37%, naik menjadi 17,21% pada tahun 2012. Tahun 2013 sebesar 17,36%, naik pada tahun 2014 menjadi 21,62%. Tahun 2015 terjadi kenaikan menjadi 22,54%.

3.2. Rasio Efektivitas PAD

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas pendapatan asli daerah dapat diketahui bahwa rasio efektivitas Kabupaten Sukoharjo mengalami peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2011 rasionya sebesar 107,71%. Tahun 2012 meningkat menjadi 116,44%. Tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 113,20%, tahun 2014 mengalami peningkatan kembali menjadi 122,84%, dan tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 120,00%. Namun, kinerja keuangan Kabupaten Sukoharjo sudah efektif karena rata-rata efektivitasnya di atas 100% yaitu 116,04%.

3.3. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Berdasarkan perhitungan pada rasio efisiensi diketahui bahwa rata-rata efisiensi keuangan daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2011 sampai dengan 2015 sebesar 95,30% atau dapat dikatakan efisien. Pada tahun 2011 rasio efisiensinya sebesar 95,46%, kemudian tahun 2012 menjadi 98,30%, tahun 2013 sebesar 93,85%, tahun 2014 sebesar 97,19%, dan tahun 2015 sebesar 91,69%. Tetapi, biaya yang dikeluarkan oleh Pemkab. Sukoharjo untuk memperoleh pendapatannya masih cukup besar. Dapat dikatakan kinerja

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam hal ini masih buruk karena belum dapat menekan jumlah belanja daerahnya.

3.4. Rasio Aktivitas/ Keserasian

Dari perhitungan rasio keserasian dapat dilihat bahwa pada tahun 2011 rasio belanja operasinya sebesar 89,61% menurun pada tahun 2012 menjadi 80,42%, kemudian naik pada tahun 2013 menjadi 83,41%. Pada tahun 2014 meningkat menjadi 87,01%, dan pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 83,77%, sehingga rata-rata rasionya sebesar 84,84%. Sedangkan rasio belanja modal pada tahun 2011 sebesar 10,02% naik menjadi 19,53% pada tahun 2012. Pada tahun 2013 menurun menjadi 16,36%. Mengalami penurunan pada tahun 2014 menjadi 12,97% dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 16,22% sehingga rata-rata rasionya sebesar 15,02%. Hal tersebut terjadi karena sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Daerah masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga rasio belanja modal relatif kecil.

3.5. Rasio Pertumbuhan

Berdasarkan perhitungan pada rasio pertumbuhan dapat dilihat bahwa pertumbuhan PAD mengalami pertumbuhan positif meskipun fluktuatif. Mengalami pertumbuhan paling tinggi pada tahun 2012 sebesar 71,53%. Pendapatan daerah juga mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 12,19%. Belanja operasi rata-rata pertumbuhannya sebesar 9,91%, dan rata-rata pertumbuhan belanja modal sebesar 31,81%. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo harus selalu meningkatkan PAD nya dengan cara mengoptimalkan berbagai macam potensi yang dimilikinya. Akan lebih baik apabila tidak terlalu bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat agar bisa mandiri mengelola daerahnya dengan PAD yang tinggi.

3.6. Debt Service Coverage Ratio

Berdasarkan perhitungan *debt service coverage ratio*, dapat diketahui bahwa kemampuan membayar kembali pinjaman Pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2011 sampai tahun 2015 sangat baik dikarenakan rasio-nya di atas

2,5 yakni 397,05 pada tahun 2011, 58,17 pada tahun 2012, 1513,14 pada tahun 2013, 17,10 pada tahun 2014 dan 20,94 pada tahun 2015.

4. PENUTUP

Berdasarkan uraian analisis data dan pembahasan, maka dapat diambil simpulan bahwa rasio kemandirian masih sangat rendah dengan rerata 18,02% tetapi terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Rasio efektivitas cenderung efektif dengan rerata 116,04% sedangkan rasio efisiensi sudah efisien dengan rerata 95,30%. Pada rasio keserasian, alokasi dana masih diprioritaskan untuk belanja operasi sebesar 84,84% daripada untuk belanja modal sebesar 15,02%. Rasio pertumbuhan menunjukkan trend positif kecuali pada pos belanja modal ada yang negatif. *Debt service coverage ratio* sudah lebih dari standar kemampuan 2,5%. Dengan demikian, kinerja Pemerintah Kabupaten Sukoharjo berdasarkan analisis rasio keuangan daerah cukup baik.

Adapun saran yang ingin penulis sampaikan antara lain sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo seharusnya tidak selalu mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat. Agar kedepannya bisa tumbuh menjadi kabupaten yang mandiri, mampu mengelola keuangannya dengan baik dan benar, serta kesejahteraan masyarakat lebih meningkat.
- b. Belanja rutin daerah sebaiknya ditekan dan sebaliknya belanja modal lebih ditingkatkan dalam rangka pembangunan infrastruktur daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bisma, I., D., G., dan H. Susanto. 2010. Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003–2007. *Jurnal GeneÇ Swara Edisi Khusus*. Vol .4 No. 3: 75-86.
- Boedi, Soelistijono. 2012. Analisis Kinerja Keuangan Pada APBD Pemerintah Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan. *Jurnal SPREAD-Oktober 2012*, Vol. 20. No. 2.
- Hanik, Fitri Umi & Karyanti, Tutik Dwi. 2014. Analisis Rasio Keuangan Daerah Sebagai Penilaian Kinerja (Studi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang). *JABPI* Vol. 22 No. 2.

- Nuruwael, Grace M. & Sitohang, Sonang. 2013. Analisis Rasio Keuangan Sebagai Alat Untuk Menilai Kinerja Keuangan PT. International Nickel Corporation, Tbk. *Jurnal Ilmu & Riset Manajemen* Vol. 2 No. 1.
- Machmud, M., G. Kawung, dan W. Rompas. 2014. Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol. 14 No. 2: 1-13.
- Mariani, L. 2013. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Sesudah Pemekaran Daerah. *Jurnal Akuntansi*. Vol. 1 No. 2.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang *Pelapoporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 Tentang *Pinjaman Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Pilat, Juddy J. & Morasa, Jenny. 2017. Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2011-2015. *Jurnal Accountability* Volume 06, Nomor 01, 2017, 45-56.
- Pramono, Joko. 2014. Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta). *Jurnal Ilmiah Among Makarti*. Vol. 7 No. 13: 83-112.
- Puspitasari, A. F. 2013. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2007-2011. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*. Vol. 1 No. 2: 1-22.
- Rahmayati, Anim. 2016. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013. *Jurnal EKA CIDA* Vol. 1 No. 1 Maret 2016 ISSN: 2503-3565 e-ISSN: 2503-3689.
- Rondonuwu, R.H., et al. 2015. Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA* Vol.3 No.4 Desember 2015, Hal.23-32.
- Rusman, L., et al. 2018. Analisis Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palu Dalam Membiayai Pengeluarannya. *Jurnal Katalogis*, Vol. 6 No. 4: 37-47.

- Santosa, Oldison., et al. 2014. Analisis Kinerja Keuangan Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan Dan Aset (DPPKA) Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal EMBA* Vol.2 No.3 September 2014, Hal. 1512-1521.
- Sijabat, Mentari Yosephen,dkk. 2013. Analisis Kinerja Keuangan Serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi pada dinas pendapatan daerah dan badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota Malang tahun anggaran 2008-2012). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2 , No. 2.
- Sumenge, Ariel S. 2013. Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA* Vol.1 No.3 September 2013, Hal.74-81.
- Suoth, Novelya, et al. 2016. Pengukuran Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan Dan Aset (DPKPA) Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA* Vol.4 No.1 Maret 2016, Hal.613-622.
- Syahril, Mega F. & Ilat, Ventje. 2016. Evaluasi Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Barang Milik Daerah (BPKBMD) Kota Bitung. *Jurnal EMBA* Vol.4 No.3 September 2016, Hal. 640-649.
- Wahyuni, Nanik. 2010. Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Malang. *El-Muhasaba*, Vol. 1, No. 1.